

Penerapan E-Government Ditingkat Kabupaten (Case Study Kabupaten Pelalawan Riau)

Angraini

Jurusan Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: angraini@uin-suska.ac.id

Abstract

In the master plan guides the development of e-Government, e-government implementation aimed towards good governance, the concept of e-Government should be applied at every level of government agencies and regional centers. The central government will coordinate with local governments in developing and implementing e-government. One of the objectives of e-government is to assist in the process of both central and local government. To support the implementation of the tasks of the government and development and addressing society's demands for transparency, efficiency and better services by utilizing information technology, the Government Pelalawan sees the need of development in the field of Information Technology Development. Local government district. Pelalawan very aware of the importance of implementing e-government service delivery government in. In the application of e government adapted to the development of e-government roadmap made in accordance with the conditions and requirements of information technology.

Keywords: e-government, governance, information, technology, regional

Abstrak

Dalam panduan pengembangan master plan e-government, penerapan e-government bertujuan untuk menuju good governance maka konsep e-Government harus diterapkan di setiap lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. Pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan e-government. Salah satu tujuan penerapan e-government adalah untuk membantu dalam proses pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan, efisiensi dan pelayanan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka Pemerintahan Kabupaten Pelalawan memandang perlu pembangunan di bidang Pengembangan Teknologi Informasi. Pemerintah daerah Kab. Pelalawan sangat menyadari pentingnya penerapan e- government dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Dalam penerapan e- government disesuaikan dengan roadmap pengembangan e- government yang dibuat sesuai dengan kondisi teknologi informasi dan kebutuhan.

Kata kunci: e- government, governance, teknologi, informasi, daerah

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan e-Gov di Indonesia telah dimulai saat sebelum adanya inpres No.3 Tahun 2003, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan jaringan telepon. Pemerintah menyadari akan manfaat penyelenggaraan e-Gov yang mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penyelenggaraan ini membuka cakrawala baru dalam keterbukaan dan daya tanggap dikalangan pemerintahan, serta tanggung jawab pemerintahan. Untuk mengimplementasikan *e-government* dibutuhkan kesiapan dibidang infrastruktur telekomunikasi, kesiapan sumber daya manusia dipemerintahan, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, perubahan paradigma dan tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintahan [1]

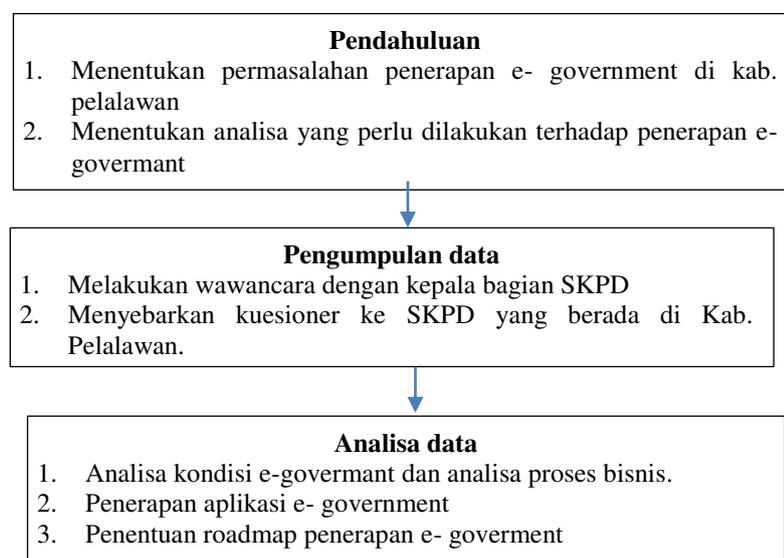
Dalam panduan pengembangan master plan *e-government*, penerapan *e-government* bertujuan untuk menuju *good governance* maka konsep *e-Government* harus diterapkan di setiap lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. Model penerapan *e-Government* di setiap lembaga akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap lembaga pemerintah. Hal ini akan menentukan struktur data dan model bisnis yang mendasari model

layanan dan arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan. Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah harus mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (INPRES No. 3 Tahun 2003). [2] Pemerintah daerah Kab. Pelalawan sangat menyadari pentingnya penerapan e- government dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Pada evaluasi peringkat *e-govermant* yang dilakukan oleh Keminfo pada tahun 2013, Provinsi riau berada pada peringkat 15. [3] Sedangkan Kab. Pelalawan berada pada peringkat 4 diantara kabupaten yang ada di provinsi Riau. Peringkat tersebut masih dalam kategori kurang, adapun bagian yang memiliki nilai yang sangat rendah adalah bagian kebijakan. Kebijakan terkait tentang penerapan e-govermant belum banyak diterbitkan di kab. Pelalawan.

Dalam penerapan aplikasi *e-goverment* juga membutuhkan pendanaan yang cukup besar, sehingga memerlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, aparat pemerintahan dan masyarakat. Implementasi *e-government* di indonesia saat ini dilihat dari sisi aplikasi layanan baik itu G2C, G2B, maupun G2G masih tertinggal jauh. Layanan *back office* (G2B) masih belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap layanan *front office* (G2C dan G2B). Hal ini disebabkan masih kurangnya komitmen dari para *stakeholder*. Penerapan ICT yang belum merata, tingkat kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang handal juga tercermin pada budaya kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu tentang tujuan penerapan, manfaat maupun strategi pengembangan belum sepenuhnya terlaksana. Sampai saat ini layanan portal hampir dimiliki oleh semua lembaga pemerintahan dan pemerintahan daerah, namun pemanfaatan IT masih minim, administrator web yang melakukan update berdasarkan informasi sekunder seperti surat kabar, internet dan hasil perbandingan opini publik. [4]

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perencanaan yang mengacu pada analisa yang dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara dan survei. Wawancara yang dilakukan dengan kepala bagian masing – masing unit kerja. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner untuk mengetahui kondisi penerapan teknologi informasi. Alur penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur penelitian

3. Dasar Teori

3.1 Definisi E-government

Definisi *e-Government* menurut bank dunia ”*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government*”. Sedangkan pemerintahan Italy mendefinisikan e-government yaitu: “ *the use of modern ICT in the modernization of our administration, which comprise the following classes of action* :

1. *Computerization designed to enhance operational efficiency within individual departments and agencies.*
2. *Computerization of services to citizens and firms, often implying integration among the services of different departements and agencies.*
3. *Provision of ICT access to final users of government services and information.*

Dari beberapa definisi *e-government* terdapat kesamaan karakteristik yang sama yaitu *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen antara pemerinthan dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder)) dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang berjalan. Pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*inter-agency relationship*) [5]. *E-Government* ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain:

- ✓ Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (*info kiosk*), ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah anda? Komoditas apa yang paling utama? Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di daerah anda? Berapa jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di era otonomi daerah, fungsi penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu keberhasilan.
 - ✓ Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.
 - ✓ *E-procurement* dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan
- Keempat tujuan berikut dapat dicapai ketika proyek-proyek *e-government* sukses diimplementasikan:

- ✓ Layanan pemerintah *online*
- ✓ Pemerintah —tanpa kertas
- ✓ Pemerintah berbasis pengetahuan
- ✓ Pemerintah yang transparan

Untuk mencapai keempat tujuan tersebut, *e-government* pada level negara, provinsi, dan lokal harus dibangun. Ada tiga tugas besar dalam tiap tingkatan pemerintahan tersebut: a) menginovasi layanan masyarakat (G2C); b) menginovasi layanan bisnis (G2B); dan c) menginovasi cara kerja

pemerintah (G2G). Penerapan TIK untuk menginovasi layanan masyarakat (G2C), layanan bisnis (G2B), dan cara kerja pemerintah (G2G) menggunakan *e-Government Plan* Republik Korea sebagai kasus utama. Republik Korea mencapai peringkat enam dalam indeks *United Nations e-Government Readiness* tahun 2008, yang merupakan gabungan dari indeks pengukuran Web, indeks infrastruktur telekomunikasi, dan indeks sumber daya manusia. Hal tersebut mengukur aspek-aspek 'government-to-citizen' (G2C) dan 'government-to-government' (G2G) sebagai bagian dari *e-government*. Survey tahun 2008 juga mencakup beberapa elemen 'government-to-business' (G2B). [6]

3.2 Inovasi Layanan Masyarakat (G2C) dan Layanan Bisnis (G2B) (*Front-Office Delivery*)

Layanan G2C mencakup penyebaran informasi kepada publik serta layanan dasar masyarakat sedangkan transaksi G2B meliputi berbagai layanan antara pemerintah dan komunitas bisnis. Layanan G2C elektronik atau yang berbasis TIK ditandai dengan sebuah sistem pertukaran informasi pemerintah dan aplikasi-aplikasi berbasis Internet yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan lainnya dengan menggunakan sebuah portal *online* yang *single window*. Portal seperti itu menyediakan layanan-layanan masyarakat seperti:

- Pemrosesan dan penerbitan berbagai surat izin/perizinan dan sertifikat
- Informasi terhadap hal-hal legislatif/administratif dan hukum-hukum yang berkaitan
- Jasa pembayaran, termasuk pajak dan pembayaran iuran sosial
- Kesempatan untuk berpartisipasi dalam administrasi pemerintahan melalui permintaan pendapat publik dan pemungutan suara elektronik.

Untuk mendirikan sebuah portal masyarakat dan sistem pertukaran informasi publik, basis data penduduk, *real estate*, kendaraan, pajak, dan asuransi perlu diintegrasikan. Penyediaan layanan G2B elektronik dapat berupa sebuah *one-stop single-window service* untuk bisnis. Layanan yang diberikan meliputi urusan administrasi perusahaan, informasi industri, dan layanan transaksi elektronik seperti pengadaan, penawaran dan pengumuman pemenang, serta layanan pembayaran untuk berbagai pajak dan pungutan publik. Penyampaian G2B elektronik yang efektif membutuhkan pengaplikasian TIK sebagai berikut:

- Sistem *e-procurement* terintegrasi — misalnya sebuah sistem pengadaan pemerintah yang *single-window* dimana semua proses-proses terkait pengadaan, seperti pendaftaran, tender, kontrak, dan pembayaran, dilakukan melalui Internet.
- Sebuah sistem *e-customs* yang akan melancarkan administrasi bea cukai dalam industri ekspor impor dan menciptakan larangan penyelunduran yang efektif.
- *e-Commerce* untuk mendukung penjualan dan pembelian barang dan jasa secara *online*. [7]

3.3 Inovasi Cara Kerja Pemerintah (G2G) (*Back-Office Delivery*)

Penggunaan G2G elektronik bertujuan untuk mereformasi proses kerja internal pemerintah untuk meningkatkan efisiensi. Lebih spesifik lagi, mereformasi proses kerja pemerintah menggunakan TIK diharapkan mampu memberikan hasil-hasil sebagai berikut:

- Sistem pelaporan antara pemerintah daerah dan pusat menjadi terhubung, sehingga meningkatkan akurasi.
- Ada pertukaran informasi antar lembaga dalam bentuk penggunaan basisdata bersama. Hal ini meningkatkan efisiensi.
- Pertukaran ide dan sumber daya antar lembaga-lembaga pemerintah.
- Pengambilan keputusan terkolaborasi melalui konferensi video.

Digitalisasi pemrosesan dokumen di lembaga pemerintahan dan gerakan menuju operasi pemerintah yang *paperless* adalah gerakan utama G2G. Pertukaran *e-Document* diharapkan mampu menjamin efisiensi, keamanan, dan kehandalan administrasi. Sistem G2G membutuhkan hal-hal seperti berikut:

- Penetapan proses-proses pekerjaan secara elektronik
- Pemrosesan dokumen elektronik
- Sistem manajemen pengetahuan (*Knowledge management system*)

3.4 Keuntungan Kesuksesan Implementasi TIK dalam Pemerintah

Tabel 1 menunjukkan perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi proses kerja pemerintah sebagai hasil reformasi berbasis TIK yang efektif. [1]

Table 1. Perubahan pada Proses Kerja Pemerintah dalam e-Government

. Sebelum	Sesudah
Proses kerja pemerintah menggunakan kertas	Proses dokumen berbasis elektronik
Prosedur berorientasi departemen	Prosedur berorientasi pelayanan
Banyaknya jalur kontak ke pemerintah dan kunjungan personal (tatap muka) ke kantor-kantor pemerintah	Jalur kontak tunggal dan akses <i>online</i> , sehingga kunjungan personal tidak begitu diperlukan
Manajemen sumber daya informasi tingkat departemen, dengan banyaknya duplikasi dan pemborosan antar departemen yang berbeda	Manajemen sumber daya informasi terintegrasi menggunakan standar umum dan ditandai dengan konvergensi

4. Pembahasan

Kab. Pelalawan telah menerapkan e- government dari tahun 2011, ini terlihat dari aplikasi e-government yang digunakan di kab. Pelalawan.

Di dalam menunjang pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi di daerah, pengadaan sarana dan prasarana penunjang Teknologi Informasi merupakan syarat utama yang harus dilaksanakan. Kondisi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi di Kabupaten Pelalawan adalah:

- Perusahaan yang menggunakan komputer dalam operasionalnya, mencapai 68,6 %, hanya jumlah unit PC masih sedikit, yaitu kurang dari 5 yang mencapai 40 % dari total responden perusahaan yang sebagiannya berspesifikasi di atas Pentium IV (68%).
- Semua instansi pemerintah (100%) telah menggunakan komputer dalam layanan operasionalnya, 75 % diantaranya telah menggunakan PC Pentium IV keatas. Hanya saja

tidak setiap staf tersedia/menggunakan komputer, hanya 40 % yang tersedia/menggunakan komputer. Hal ini menyebabkan lebih dari 50 % instansi menyatakan bahwa fasilitas komputer belum memadai untuk operasional layanan. 32 % instansi telah mempunyai Laptop untuk mendukung operasionalnya.

- c. Baik masyarakat, instansi maupun perusahaan, masih dominan menggunakan Sistem Operasi Windows (95/2000/XP), yaitu mencapai 82 % Alternatif Sistem Operasi yang digunakan adalah Linux, DOS, Windows NT.
- d. Penggunaan aplikasi yang paling dominan di masyarakat, instansi dan perusahaan adalah pemakaian software perkantoran (Microsoft Office), yaitu untuk perusahaan 80 % dan instansi 92%.
- e. Untuk instansi, masih sedikit yang menggunakan Pemrograman Web, kurang dari 10%.

Peningkatan infrastruktur jaringan komputer yang belum mendukung sepenuhnya penerapan aplikasi yang direncanakan, baik yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun aplikasi yang akan dikembangkan secara swadaya oleh kab. Pelalawan.

Salah satu aplikasi e-governmant yang belum diterapkan oleh Kab. Pelalawan adalah aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi dan pertukaran data). Aplikasi MANTRA bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda Database, Aplikasi maupun Sistem Operasinya. Aplikasi MANTRA dapat difungsikan sebagai GSB (*Government Service Bus*) dan Web-API (*Application Programming Interface*). GSB merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah. GSB mampu mensinergikan informasi dari beberapa Web-API (*Application Programming Interface*). Web-API dapat dipandang sebagai media Interoperabilitas Sistem Informasi. Sedangkan aplikasi e-govemant yang telah diterapkan di Kab. Pelalawan adalah SIMAYA (Administrasi perkantoran maya). Aplikasi ini merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah Namun dalam penerapannya belum digunakan sepenuhnya oleh SKPD yang ada di Kab. Pelalawan.

Penerapan e- government yang belum suksse juga terlihat dari situs web yang dimiliki pemerintahan daerah. Situs web pemerintah daerah yang merupakan tingkat pertama pengembangan Teknologi Informasi sudah dimiliki oleh pemerintah daerah. Khusus untuk situs web pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat responsif pengelola situs web, antara lain yaitu :

1. Website telah diupdate dan memiliki link dengan beberapa SKPD di lingkungan kab.Pelalawan, namun jumlah kunjungan masih sedikit.
2. Baik masyarakat maupun perusahaan, masih relatif sedikit yang meng-akses web www.pelalawankab.go.id. Masyarakat meng-akses web dengan tujuan untuk mengetahui informasi pemerintahan, sedangkan perusahaan lebih banyak bertujuan untuk mengetahui peraturan pemda.
3. Hanya sedikit sekali masyarakat yang pernah e-mail kepada web www.pelalawankab.go.id
4. Sosialisasi website perlu ditingkat serta penambahan informasi yang lebih beragam sehingga dapat meningkatkan kunjungan masyarakat.

Berdasarkan survey yang dilakukan pada website kab. Pelalawan, terdapat beberapa situs yang tidak bisa diakses, adapun alamat situs yang ada di website kab. Pelalawan sebagai berikut:

Tabel 2. situs yang tidak bisa diakses.

SKPD	Website	Terakhir update
Dinas Kebudayaan	www.Pelalawantourism.com	29 september 2014
Dinasa Tata Kota	www.tatakota.pelalawankab.go.id	Situs tidak tersedia
Dinas Pertanian	www.Distan.pelalawankab.go.id	2009
Kecamatan Bandar Sei Kijang	Kecamatanbdrseikijang.com	Situs tidak tersedia
Bappeda	www.bappeda.pelalawankab.go.id	29 desember 2014
LPSE	www.lpse.pelalawankab.go.id	31 Oktober 2014
Dinas pertambangan dan Energi	www.distamben.pelalawankab.go.id	24 November 2014
BKD	www.bkd.pelalawankab.go.id	16 november 2014
Dinas Perindustrian	www.disperindagsar.pelalawankab.go.id	5 desember 2012

Dalam penerapan aplikasi e- government di kab. Pelawan di sesuaikan dengan aplikasi yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa SKPD, sudah cukup banyak aplikasi yang telah dibuat, baik untuk keperluan internet maupun untuk layanan publik. Operation system dan aplikasi yang dibuat menggunakan berbagai standar yang berbeda, hal ini terjadi karena pembangunan basisdata dan aplikasinya berasal dari sejumlah konsultan yang berbeda. Akibat adanya perbedaan tersebut diatas, maka antara satu basisdata dengan basisdata lainnya tidak memungkinkan untuk berkomunikasi data. Saat ini aplikasi yang banyak digunakan oleh dinas/badan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Aplikasi yang digunakan dinas kab. Pelalawan

Aplikasi	SKPD
SIMAKDA	PDE
SIMPEG	PDE
LPSE	PDE
SISMIOP	DISPENDA
SIMPATDA	DISPENDA
SISTEM PELAYANAN	KPPT
SPIPISE	KPPT
SISTEM RETRIBUSI	KPPT
E-VOTING	KPPT
M-KIOS	KPPT
SIK	CAPIL
APIS	CAPIL

Dalam pengembangan e- government, tahapan awal yang dilakukan adalah analisa proses bisnis yang berjalan. Proses bisnis yang berjalan di lingkungan kab. Pelalawan sesuai dengan unit kerja/ divisi masing – masing. Berikut proses bisnis yang ada di unit PDE:

1. Pelayanan Publik – merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan kepada warga dan komunitas bisnis, baik layanan informasi, komunikasi maupun transaksi.
 - Aplikasi yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk website, portal dan LPSE.
2. Manajemen Internal – merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk mengelola proses bisnis standar manajemen seperti keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, pengelolaan program kerja, monitoring kinerja, dan sejenisnya.
 - Aplikasi yang digunakan SIMAKDA, SIMPEG, e-office (dalam tahap uji coba). Khusus untuk PDE tidak ada aplikasi khusus.
3. Pendukung Manajemen – merupakan aplikasi yang sifatnya mendukung operasional manajemen sehingga proses-proses bisnis standar manajemen dan pelayanan kepada publik dapat optimal, mencakup di antaranya fungsional informasi, komunikasi dan kolaborasi.
 - Di bagian Humas dan PDE tidak ada aplikasi pendukung, tapi di Bappeda aplikasi pendukung yang digunakan yaitu fingerprint.
 - VoIp (dalam tahap uji coba)

Datawarehouse & Business Intelligence – merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola laporan dan fasilitas analisa data multidimensional Untuk pengembangan dan penerapan aplikasi e- government, maka dirancanglah arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi di buat berdasarkan blok fungsi yang disesuaikan kebutuhan pemerintahan daerah dan SKPD yang ada. Berikut contoh rancangan blok fungsi untuk kab. Pelalawan.

Modul :	KEPENDUDUKAN
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub- blok fungsi	--
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data Lainnya Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan pendaftaran penduduk ▪ Pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk ▪ Pembuatan dan pengelolaan data KK dan KTP ▪ Pembuatan dan pengelolaan data Akta Pencatatan Penduduk (akta kelahiran, perkawinan, pereraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Tamu ▪ Pelaporan data kependudukan
Narasi	Modul Kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan (untuk disampaikan kepada Mendagri). Sebagian data kependudukan di publish ke internet untuk keperluan masyarakat.
Organisasi	Dinas Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan)
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota lain ▪ Sistem Kependudukan di tingkat Propinsi lain ▪ Sistem Kependudukan di tingkat Nasional
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Alias: SIMDUK, SIMDUKCAPIL ▪ Dasar Hukum: Kepmendagri 54/1999 ▪ Rekomendasi: Membangun jaringan sistem kependudukan di setiap kecamatan yang terhubung ke Pemda, web-based, client-server, automatic data synchronization, distributed processing.

Gambar 2. Rancangan Blok Fungsi Untuk Kab. Pelalawan

Dari hasil analisa kondisi penerapan e-government maka dibuatlah rencana implementasi. Rencana implementasi e-Government mengacu pada tahapan-tahapan pengembangan e-Government yang telah disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi e-Government merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan e-Government Kabupaten Pelalawan. Dalam setiap inisiatif e-Government ditentukan objective, strategic, waktu dan tolak ukur dari keberhasilan inisiatif tersebut. Selain itu perlu ditekankan juga object layanan dari masing-masing inisiatif, apakah termasuk layanan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) atau Government to Citizen (G2C) sehingga dari seluruh inisiatif yang dilakukan dalam 5 tahun ke depan terjadi proposional layanan, baik untuk internal pemerintahan, kalangan bisnis maupun untuk masyarakat.

Inisiatif 1. Aplikasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK

Objective	Pemanfaatan TIK untuk Operasional Pemerintahan		
Strategic	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		
Komponen	Infrastruktur Aplikasi		
Layanan	√ G2G		
Waktu	2015 – 2016		
Target	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk sistem pengelolaan dokumen elektronik pada setiap instansi • Terjalin komunikasi dan koordinasi antar instansi melalui jaringan komputer 		
Action		Resouces	Penanggung Jawab
	Pembuatan sistem pengelolaan dokumen elektronik & optimalisasi Kantaya	Budget	Kantor PAD

	Membudayakan penggunaan email dan VOIP	Tim Ahli TIK	DIKLAT
	Pelatihan-pelatihan <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dokumen elektronik • Pengelolaan email dan voip 	Pranata Komputer	Sekretariat Daerah
Tolak ukur	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk sistem pengelolaan dokumen elektronik • Meningkatnya koordinasi antar instansi • Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang TIK • Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah 		

Prioritas pembangunan kab.Pelalawan pada lima arah pembangunan , yaitu ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan pengembangan aparatur. Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu pada tingkatan pengembangan e-Government menurut Hermawan Kertajaya dkk. (2002), sebaiknya menuruti tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, e-Government dikembangkan sebagai internally-networked public-service provider (kuadran I)
2. Tahap kedua, e-Government dikembangkan menjadi externally-networked public-service provider (kuadran II)
3. Tahap ketiga meloncat ke externally-networked economic development oriented (kuadran IV).

Tahap pertama telah diawali dengan pembangunan infrastruktur jaringan antar instansi dan pembangunan berbagai sistem informasi di beberapa instansi, hanya saja perlu dikembangkan kearah pemanfaatan infrastruktur jaringan tersebut untuk operasional dan koordinasi antar instansi.

Tahap kedua telah dimulai dengan serta telah tersedianya tempat mengurus perijinan dalam satu loket. Kondisi ini tinggal dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan seluruh instansi perijinan secara online. Sesuai dengan visi pengembangan e-Government, pendekatan “layanan satu atap” perlu tetap dipegang dalam layanan tahap kedua ini, selain faktor efektif, efisien, transparan juga masyarakat pengguna jasa tidak perlu tahu lokasi asal atau instansi pemberi layanan, pengguna tinggal datang ke tempat pelayanan satu loket dan mendapat layanan sesuai jenis layanan yang diperlukan.

Tahap ketiga baru bisa dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Pelalawan memfasilitasi terbentuknya komunitas lokal yang berbasis TIK. Media center merupakan komunitas ditingkat bawah untuk dapat memanfaatkan TIK untuk peningkatan wawasan dan perekonomian mereka. Ketiga pentahapan tersebut akan dijabarkan dalam tahapan pengembangan e-Government untuk kurun waktu 5 tahun. Tahun 2015 adalah tahun pembangunan dan penetrasi infrastruktur, tahun 2016 adalah tahun integrasi dan tahun 2017-2019 adalah tahun layanan terintegrasi online antar SKPD

5. Kesimpulan

Penerapan e- government pada kab. Pelalawan masih perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh PEGI masih belum ditindaklanjuti. Untuk menerapkan e- government yang sesuai dengan acuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kab. Pelalawan telah mengembangkan rencana strategis teknologi informasi. Pengembangan infrastruktur juga perlu dilak [6]ukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kesiapan sumber daya manusia juga akan membantu kesuksesan dalam penerapan e- government.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Indrajit, A. Zainuddin and D. Rudiato, *e-Government In Action*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- [2] T. penyusun, *Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 2003.
- [3] T. penyusun, *PeGi Tingkat Provinsi 2013*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 2013.
- [4] A. E. Sosiawan, *Evaluasi Implementasi e-Government pada situs web pemerintah daerah di indonesia perpesktif content dan manajemen*, Yogyakarta: Seminar nasional Informatika UPN "Veteran", 2008.
- [5] E. Indrajit, *Electronic Government : Strategi pembangunan dan Pengembangan sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta: penerbit Andi, 2006.
- [6] Modul, *Modul Akademi Esensi teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pimpinan Pemerintah daerah Modul 3:Penerapan e-Government*, -: UN-APCICT, 2012.
- [7] E. A. Sosiawan, *Tantangan dan Hambatan Dalam Implemntasi e-Government di Indonesia*, Yogyakarta: Seminar Nasional Informatika UPN "Veteran ", 2008.
- [8] J. Safitri, *Implementasi dan Perkembangan e-Government di indonesia*.
- [9] T. penyusun, *Dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi kab.Pelalawan*, Pelalawan: tidak untuk dipublikasikan, 2012.